

dimana korupsi menjadi berita *day to day*. Pelayanan terhadap masyarakat tidak menunjukkan peningkatan signifikan.

Dengan keadaan yang demikian ini, tuntutan untuk merealisasikan *good governance* dan reformasi birokrasi makin nyaring diteriakkan belakangan ini karena perubahan yang dijanjikan tidak terealisasi. Kehidupan masyarakat tidak membaik, bahkan cenderung merosot dan menderita. Untuk mengatasi kondisi itu, diperlukan solusi yang tidak biasa. Hal penting yang perlu difokuskan pemerintah adalah menciptakan secara serius *good governance* dengan mengupayakan akuntabilitas, menciptakan stabilitas, efektif dalam melayani masyarakat, penegakan hukum yang independen dan tidak memihak, dan memiliki kontrol terhadap korupsi agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang merugikan rakyat.

Lantas untuk mengatasi semua keluhan tersebut, perlu dilakukan suatu reformasi birokrasi yang terarah, terencana dan sistematis. Serta berani membuat terobosan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diperlukan komitmen dari rezim ke rezim untuk melanjutkan program reformasi birokrasi, sehingga *good governance* bisa berlangsung dalam jangka panjang seiring dengan jalannya proses demokratisasi.

Pemerintah dituntut untuk bisa melakukan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Proses pelayanan publik tersebut mencakup obyek yang luas seperti pengurusan KTP, berbagai macam perizinan, penyediaan air bersih, dan sebagainya. Keseluruhan pelayanan yang harus dilakukan oleh birokrasi harus dilakukan secara profesional, netral dan akuntabel.

Dengan demikian birokrasi mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi menyangkut tidak hanya para birokrat tetapi juga sangat terkait dengan organisasi, manajemen pengelolaan pemerintahan, dan kualitas pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Mengingat sangat pentingnya keberadaan birokrasi, maka sangat diperlukan adanya upaya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur.

Berbagai permasalahan dan hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Birokrasi yang sudah dijalani sampai detik ini, jalannya belum begitu optimal, hal tersebut ditandai dengan masih maraknya protes dan keluhan dari berbagai elemen masyarakat yang menuntut untuk dilakukannya perbaikan di dalam penyelenggaraan pemerintah yang transparan, responsif dan akuntabel. Beberapa survey yang dilakukan oleh berbagai lembaga juga menunjukkan rapor buruk birokrasi dalam memberikan pelayanan publik di Indonesia seperti dalam tabel berikut:

perkembangan maupun tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik.

Pemerintah tidak dibangun untuk melayani kebutuhannya sendiri, tetapi bertujuan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat agar dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi berbicara pelayanan publik yang oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara adalah sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Hal senada yang dikemukakan oleh Siagan (2003:137) bahwa pemerintah didirikan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti halnya eksistensi setiap organisasi. Salah satu tujuan yang ingin dicapai ialah peningkatan kesejahteraan seluruh warga negara, tidak hanya dalam arti material saja, akan tetapi juga menyangkut semua bidang kehidupan karena secara langsung bersangkutan paut dengan harkat dan martabat manusia. Kesemua itu berakibat pada predikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan yang akan tetap merupakan tuntutan nyata dalam kehidupan bernegara.

Sedangkan dari sektor publik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Savas (2000:67) tentang terminologi pelayanan pemerintah dengan judul *“privatization and public private partnership” is the delivery of a services by a government agency using its own employee.* Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah pemberian pelayanan oleh agen-agen pemerintah melalui pegawai-pegawainya, hal ini disebabkan karena negara dan sistem

pemerintahan menjadi satu-satunya tumpuhan pelayanan warga negara dalam memperoleh jaminan atas segala hak-haknya, maka dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan akan menjadi semakin penting.

Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat dari suatu negara yang menganut suatu ideologi negara kesejahteraan. Negara dalam memberikan pelayanan publik dilakukan oleh instrument pemerintah yaitu birokrasi. Oleh karena itu berbagai patologi birokrasi harus segera diatasi dan dilakukan perubahan (*reform*).

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi birokrasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi ini harus dilaksanakan di seluruh lembaga pemerintah, termasuk Perusahaan Daerah Air Minum.

Mengingat Perusahaan Daerah Air Minum merupakan perusahaan daerah yang bertujuan untuk menyediakan air bersih di daerah-daerah. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjelaskan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Berdasarkan pasal tersebut maka bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kemudian pada pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 LN. 1962 Tentang Perusahaan Daerah menjelaskan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di Daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan”. Berdasarkan pasal tersebut, maka cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak harus diusahakan oleh daerah kemanfaatannya, termasuk juga berkaitan dengan proses penyediaan air bersih. Sebelum maupun sesudah otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan menyediakan air bersih untuk masyarakat yang ada pada daerahnya.

Hal ini kemudian membuat posisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi sangat penting. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

proses penyusunan kebijakan pemerintah, menjalankan sosialisasi politik, menjadi stabilitator politik, menjadi pengendali pembangunan, melakukan pelayanan dan sebagainya. (Waluyo:2007)

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa di samping peranan tradisionalnya sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi juga memainkan peranan politik. Akibatnya birokrasi tidak hanya tumbuh menjadi besar dan kuat seiring dengan lajunya pembangunan, tetapi juga memiliki kekuasaan yang sangat luas.

Max Weber (Ritzer, 2010:142) mengatakan bahwa birokrasi merupakan suatu pengorganisasian yang tertib, tertata dan teratur, dalam hubungan kerja yang berjenjang, serta mempunyai prosedur kerja yang tersusun jelas dalam suatu tatanan organisasi. Weber memberikan ciri-ciri utama birokrasi ideal yaitu:

- a. Adanya struktur hierarki, termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi (*a hierarchial structure involving delegation of authority from the top to bottom of an organization*).
- b. Adanya serangkaian porsi-porsi jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab yang tepat (*a series at officials positions offices, each having prescribed duties and responsibilities*).
- c. Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi dan standar-standar formal yang mengatur tata kerja organisasi dan tingkah laku para

- a. Adanya spesialisasi atau pembagian kerja.
- b. Adanya hierarki yang berkembang.
- c. Adanya suatu sistem dari suatu prosedur dan aturan-aturan.
- d. Adanya hubungan-hubungan kelompok yang bersifat impersonal.
- e. Adanya promosi dan jabatan yang didasarkan atas kecakapan.

Dalam kenyataan, (Kristiadi:1993) birokrasi dimaksudkan untuk melaksanakan penyelenggaraan bernegara, penyelenggaraan pemerintah termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan. Friedrich (Waluyo, 2007:56) mengidentifikasi birokrasi sebagai suatu bentuk yang ditandai oleh hierarki, spesialisasi peranan dan tingkat kompetensi yang tinggi yang ditunjukkan oleh para pejabat yang terlatih untuk mengisi peranan tersebut. Birokrasi pemerintah merupakan sesuatu kekuatan besar sekali, lebih-lebih birokrasi bagi suatu negara yang sedang membangun. Kegiatannya menyentuh setiap kehidupan manusia. Munculnya birokrasi, bukan hanya untuk menjalankan tetapi mengkoordinasikan berbagai unsur dalam proses pemerintahan, fenomena yang lebih penting adalah bahwa birokrasi sebenarnya diciptakan untuk menjalankan fungsi pendisiplinan dan pengendalian.

Dari berbagai uraian di atas pada pokoknya birokrasi itu dapat dibedakan kedalam kategori fungsi berikut:

- a. Birokrasi pemerintah umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan umum

yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tugas-tugas tersebut lebih bersifat mengatur atau *regulative function*.

- b. Birokrasi pembangunan, yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang sektor khusus guna mencapai tujuan pembangunan, seperti petanian, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Fungsi pokoknya adalah *development function*.
- c. Birokrasi pelayanan, yaitu unit organisasi pemerintahan yang pada hakikatnya merupakan bagian atau berhubungan dengan masyarakat.

Fungsi utamanya adalah *service* (pelayanan) langsung kepada masyarakat. Untuk menciptakan sosok birokrasi pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dinamika dalam melaksanakan tugas-tugas negara, merupakan modal birokrasi yang dibutuhkan dalam kerangka pemerintah yang berorientasi pelayanan (*customer driver government*).

Untuk mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan harapan seperti yang tersebut di atas, maka birokrasi perlu dilengkapi dengan personalia yang profesional dengan spesialisasi yang bagus dan aturan yang cukup baik, namun struktur yang mendasarinya terkadang justru tidak rasional. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan di dalam birokrasi adalah perlunya reorientasi peran birokrasi. Barzeley

tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan dan etika.

Selanjutnya Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) mendefinisikan bahwa kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Kinerja individu atau perorangan dan organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Dengan demikian kinerja lembaga (organisasi) salah satunya ditentukan oleh kinerja sekelompok orang sebagai pelaku organisasi.

Kinerja menggambarkan apakah suatu proses yang dirancang dalam organisasi memungkinkan organisasi tersebut mencapai misi dan tujuannya. Oleh karena itu penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Informasi mengenai kinerja dalam organisasi pelayanan publik sangat

birokrasi serta sikap birokrat guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sehingga tercipta birokrasi publik yang sehat. Reformasi Birokrasi dirumuskan dan diselenggarakan oleh pemerintah untuk membentuk jajaran aparatur publik yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan semakin baik.

Penggunaan istilah reformasi mengacu pada perbaikan atau perubahan birokrasi yang menurut (Khan, 1981:24) memberi pengertian reformasi sebagai suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama. Lebih lanjut (Khan, 1981:24) mendefinisikan reformasi birokrasi sebagai suatu proses untuk mengubah proses, prosedur birokrasi publik serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional. Aktivitas reformasi sebagai padanan lain dari *change, improvement, atau modernization*.

Reformasi birokrasi merupakan perubahan atau inovasi secara sengaja dibuat dan diterapkan untuk menjadikan sistem birokrasi tersebut sebagai suatu agen perubahan sosial yang lebih efektif dan sebagai suatu instrument yang dapat lebih menjamin adanya persamaan politik, kaedaan sosial dan pertumbuhan ekonomi. (Khan, 1981:25)

Dari berbagai definisi diatas, reformasi birokrasi tersebut, dapat ditarik beberapa poin penting bahwa reformasi birokrasi disinonimkan dengan perubahan (*change*), memiliki hubungan yang erat dengan

inovasi (*innovation*), agar reformasi birokrasi ini dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan perubahan secara sistemik dan bersifat luas, faktor utamanya dilakukan reformasi birokrasi adalah cepatnya perubahan sistem administrasi, dan tujuan dari reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian maka reformasi birokrasi merupakan suatu upaya perbaikan yang dilakukan secara terencana dan terus-menerus disegala aspek birokrasi yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja birokrasi publik.

Memperbincangkan birokrasi di negara ini, tampaknya tetap merupakan bahasan yang menarik untuk dicermati. Berangkat dari argumen awal bahwa birokrasi adalah institusi modern yang wajib ada dalam khazanah penyelenggaraan pelayanan publik, ia patut dicermati baik secara teoritik maupun secara empirik. Pencermatan terhadap kinerja birokrasi inilah, yang nantinya bisa membawa kita pada penilaian menyangkut orientasi apa yang sesungguhnya diemban oleh birokrasi.

Secara konseptual, birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang profesional, yakni birokrasi yang handal dalam memberikan pelayanan, aspiratif, akuntabel, netral dan dalam menjalankan aktivitasnya selalu dilandasi etika. Reformasi birokrasi diartikan sebagai penggunaan wewenang untuk melakukan pembenahan dalam bentuk penerapan peraturan baru terhadap sistem administrasi pemerintahan untuk mengubah tujuan, struktur, maupun prosedur yang

dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian tujuan pembangunan. Pembinaan birokrasi mengarah pada penataan ulang aspek internal maupun eksternal birokrasi.

Birokrasi yang ada Indonesia seringkali diidentikkan dengan potret birokrasi yang kurang baik. Seperti birokrasi yang kinerjanya tidak efektif (*in effective bureaucratic performance*); merujuk pada fenomena teknis, material, sumber daya manusia, kultural dan alokasi jasa-jasa pemerintahan kepada publik dengan acuan-acuan kapabilitas realisasi nilai-nilai tujuan sosial politik dan budaya. Birokrasi yang krisis, kritis dan kurang responsif; arahnya mengacu pada perilaku birokrasi pemerintahan yang kurang sempurna terutama dalam hal susunan atau konfigurasi intern sumber daya organisasinya, khususnya menyangkut elemen-elemen rasional, aliran otoritas penanganan pekerjaan, teknologi organisasi dan manajemen, kapabilitas dan kecakapan staf, mobilitas informasi, sistem komando dan kontrol, serta modernisasi proses kerja untuk mengatasi adanya proses kerja yang kaku. Birokrasi yang kehadirannya tidak menyenangkan dalam kerangka acuan rendahnya daya pengenalan prinsip-prinsip birokrasi yang dialaminya, karena kurangnya keahlian, terutama dalam hal kepekaan terhadap preferensi dan kepentingan publik.

Selanjutnya, birokrasi cacat dan lemah, mengacu pada kehadiran gejala-gejala kontroversial khususnya dalam kancah prosedur kerja birokrasi serta tuntutan perlunya adaptasi konsep teknokrasi dan inovasi

teknologi bagi penyelenggaraan tugas-tugas pengelolaan kebijakan publik.

Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk membentuk kembali, mengadakan pembaharuan dan penyesuaian. Reformasi birokrasi mengandung maksud adanya proses atau rangkaian kegiatan dan tindakan yang sungguh-sungguh rasional dan realistis sehingga ada konsep dan sistem yang jelas, berlangsung terus menerus secara berkelanjutan dalam enam pekerjaan, meliputi evaluasi, penataan, penertiban, perbaikan, penyempurnaan, dan pembaharuan. Birokrasi merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan hal-hal yang terbaik untuk menghindari adanya birokrasi tradisional yang berorientasi kosmologi karena belum berstatus birokrasi kesejahteraan, bermental priyayi dan feodalistik. Kesemua *warnig* yang diatas tadi mengindikasikan adanya harapan positif, agar dilakukan perbaikan penyesuaian (reformasi) agar mampu membentuk sosok birokrasi yang mempunyai kualitas memadai dalam menghadapi persoalan yang timbul. Birokrasi merupakan suatu struktur otoritas atau organisasi yang didasarkan atas peraturan-peraturan yang jelas dan rasional serta posisi-posisi yang terpisahkan dari orang-orang yang mendudukinya, yang sesungguhnya mewakili kepentingan rakyat maupun pemerintah dengan fungsi koordinasi, pendisiplinan, dan pengendalian proses pemerintahan dengan kuat. Kuat dalam arti

kelembagaan dan penyederhanaan ketatalaksanaan mutlak dilakukan. Dua hal yang selama ini sangat menghambat pelayanan publik, karena sering melahirkan tumpang tindih kebijakan, hirarki panjang, keputusan lambat dan mempersulit penerapan *learning organization*, agar selalu siap memodernisir organisasi sesuai derap kemajuan peradaban yang meningkatkan kebutuhan dan jenis pelayanan publik.

2. Peningkatan kapasitas SDM apratur. Melalui pengembangan karir yang didasarkan pada kualifikasi jabatan, pendayagunaan PNS melalui perbaikan jumlah, komposisi dan distribusi PNS yang ada pada setiap instansi pemerintah.
3. Pencegahan dan pemberantasan KKN pencegahan KKN melalui akuntabilitas dan kepatuhan pada perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pemberantasan KKN diupayakan secara konsisten, konsekuen, dengan sanksi hukum dengan sebaik-baiknya.
4. Pengembangan layanan prima. Diupayakan untuk lebih cepat, tepat, murah, memuaskan, tidak diskriminatif, bebas pungli, dengan berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku melalui paradigma mengedepankan hak dasar warga Negara.

Disamping langkah-langkah di atas, reformasi birokrasi perlu dilakukan melalui penataan PNS yang dilakukan secara terencana, dengan beberapa sasaran :

lain adalah berkenaan dengan masyarakat, yaitu menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya keluhan masyarakat, mengubah pembagian pekerjaan antara sistem politik dan mengubah hubungan antara sistem administrasi dan penduduk. Tujuan reformasi administrasi ditentukan oleh birokrasi pemerintah, dengan adanya peningkatan kinerja birokrasi publik.

Ada beberapa hal berkenaan dengan kebijakan tujuan reformasi birokrasi yang perlu diperhatikan. Moralitas birokrat, sistem dan prosedur pelayanan. Secara mendasar yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah perubahan perilaku birokrasi sebagai pelaku utama dan publik serta pemangku kepentingan lainnya sebagai pendukung serta pendorong perubahan. Proses dan hasil reformasi birokrasi adalah milik semua pihak. Dengan demikian penting bagi pegawai di dalam organisasi dan pemangku kepentingan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi. Reformasi birokrasi fenomena abad ke-21, menuntut perlunya reformasi birokrasi publik terutama yang menyangkut struktur organisasi, prosedur yang digunakan serta sikap dan perilaku birokrasi sebagai penyelenggara negara dan sebagai pelayan publik yang memperoleh layanan jasa dan pemberi mandat kepada penyelenggara negara karena dimaknai sebagai institusi resmi yang melakukan fungsi pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian maka segala bentuk upaya pemerintah dalam mengeluarkan produk kebijakannya semata-mata dimaknai

setiap individu, padahal manusia dan profesionalismenya merupakan modal utama bagi sebuah organisasi atau institusi.

Kondisi yang memungkinkan terciptanya iklim birokrasi dan aparatur negara yang mengabdikan pada rakyat (*public servant*) harus terus diupayakan dan dioptimalkan. Hal ini diharapkan agar dapat mencegah berlanjutnya penyimpangan dalam pelayanan birokrasi. Birokrasi harus dihindarkan dari rancangan oleh pihak-pihak yang tidak menghiraukan kepentingan publik untuk menjadikannya sebagai *power center*. Karena hal tersebut sangat berbahaya dan mengancam potensi masyarakat. (Sinambela, 2008:36)

Hal terpenting yang perlu dilakukan terkait kinerja birokrasi pemerintahan adalah bagaimana mengurangi dan menghilangkan penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi serta bagaimana menciptakan etika birokrasi yang baik.

Pada masa reformasi saat ini, (Ismail, 200:73) ternyata kondisi birokrasi belum banyak mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan yang dihadapi belum yang dihadapi pada masa-masa lalu belum sepenuhnya teratasi. Dari sisi birokrasi sendiri, dalam upaya untuk mewujudkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain adalah pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan yang tinggi, rendahnya kinerja sumber daya aparatur, sistem kelembagaan (organisasi), dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan belum memadai sehingga belum dapat meningkatkan

kemitraan dengan swasta dan masyarakat, berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan yang dimaksud di sini adalah pelayanan publik dalam aspek-aspek masyarakat atau suatu penyelenggara birokrasi pemerintah dalam mewujudkan nilai dan makna daripada suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.

untuk memenuhi kebutuhan warga negara pengguna. Begitu pentingnya birokrasi dalam pelayanan publik sehingga birokrasi selalu menjadi sorotan dan perhatian masyarakat baik pengguna layanan secara langsung maupun tidak langsung. Tidak hanya barang yang dihasilkan dalam pelayanan publik, tetapi juga jasa dalam hal memberikan pelayanan administrasi.

Lebih lanjut menjelaskan bahwa pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberi layanan (*services*) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah diterapkan. Berdasarkan beberapa teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik merupakan suatu usaha membantu atau memberi manfaat kepada publik melalui penyediaan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Sehingga pada hakekatnya, pelayanan publik bukan semata-mata persoalan administratif belaka seperti pemenuhan kebutuhan fisik melalui rumah sakit, pasar, tetapi mencakup persoalan yang lebih mendasar yakni pemenuhan kebutuhan atau keinginan masyarakat.

Bentuk pelayanan bisa diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik pada hakekatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi

masyarakat. Pelayanan publik (Waluyo, 2007:60) adalah menyediakan barang dan jasa yang terbaik bagi masyarakat. Barang dan jasa yang terbaik adalah yang memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik yang terbaik adalah yang memberikan kepuasan terhadap publik.

Pelayanan publik merupakan titik strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan *good governance* di Indonesia. Dengan beberapa alasan berikut ini:

1. Pelayanan publik selama ini menjadi arena di mana negara yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga non pemerintah. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi.
2. Pelayanan publik adalah wilayah dimana berbagai aspek *good governance* bisa diartikulasikan secara lebih mudah.
3. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur *governance* yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar. Dengan demikian, pelayanan publik menjadi titik pangkal efektifnya kinerja birokrasi.

Dari uraian diatas diketahui bahwa paradigma birokrasi sebagai pusat pelayanan publik seyogyanya diikuti dengan deregulasi berbagai aturan yang tegas, jelas, dan tidak diskriminatif sehingga proses pelayanan publik tidak lagi membutuhkan waktu yang lama. Dengan demikian proses pelayanan publik dapat dilakukan secara efektif dan

baik bukan berdasarkan persepsi penyedia jasa melainkan berdasarkan persepsi konsumen.

Definisi kualitas menurut Goetsh Davis (Shaleh, 2010:98) yakni merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Pendekatan yang digunakan Goetsh Davis ini menegaskan bahwa kualitas bukan hanya menekankan pada aspek hasil akhir, yaitu produk dan jasa tetapi juga menyangkut kualitas manusia dan kualitas lingkungan.

Kualitas pelayanan (Tjiptono, 2008:210) berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan menurut adalah tingkat baik buruknya kegiatan yang dapat diidentifikasi secara tersendiri. Kualitas pelayanan sebagai penilaian atas sejauh mana suatu pelayanan sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan atau disampaikan.

Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam pemberian layanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik.

Untuk mengetahui kualitas pelayanan (Ismail, 2009:117) yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, Zeithaml-Parasuraman-Berry

memberikan indikator kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi utama yang menentukan kualitas pelayanan publik, yaitu: Pertama, *Tangible*, yaitu kualitas pelayanan yang dilihat dari bukti fisik dari jasa bisa berupa fasilitas fisik dan peralatan yang digunakan. Kedua, *reliability* yaitu kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya. Ketiga, *responsiveness* yaitu kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen. Keempat, *assurance*, kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. Kelima, *emphaty*, yaitu sikap tegas tetapi penuh perhatian terhadap konsumen.

Dengan demikian untuk melihat kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan dan dikaji secara dua aspek pokok yakni: Pertama, aspek proses internal organisasi birokrasi (pelayan). Kedua, aspek eksternal organisasi yakni kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat pelanggan. Hal ini dimungkinkan agar layanan tersebut dapat memuaskan orang-orang yang dilayani.

2.3 Good Governance

Patologi birokrasi bisa dicegah atau dihambat perkembangannya dengan menggunakan konsep *good governance*. Konsep ini dipercaya menjadi obat mujarab untuk menyembuhkan atau setidaknya mengurangi penyakit birokrasi. *Good governance* terkait erat dengan akuntabilitas administrasi

publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab. Apakah dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan mereka tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari etika administrasi publik (*mal-administration*). Mal-administration menyimpang dari nilai-nilai administrasi publik. (Ismail, 2009 :152)

Good governance merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik. Ia muncul pada tahun 1990-an. Dalam Ismail (2010:323) dikemukakan secara harfiah *governance* berarti tata pemerintahan adalah penggunaan ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Sedangkan *governance* menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam sisi terminologinya diartikan sebagai *how government fungsional and work together with other to make decisions and take actions to deal with the needs of it's citizens* (bagaimana pemerintah berfungsi dan bekerja sama untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat). Sementara itu World Bank mendefinisikan *governance* sebagai *the way state power is used in managing economic and social resource for development of society* (cara menggunakan kekuasaan negara dalam mengelola sumber-sumber ekonomi dan sosial untuk pembangunan).

Berdasarkan dari uraian tersebut, secara umum *good governance* memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

rangka realisasi *good governance*. Dengan kata lain, kebijakan apapun yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan pada sepuluh atau dua puluh tahun ke depan.

Untuk mewujudkan cita *good governance*, disamping harus melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, adanya kontrol masyarakat merupakan aspek yang tidak kalah pentingnya. Karena dengan adanya kontrol masyarakat dalam pengelolaan lembaga pemerintahan pada akhirnya akan melahirkan tata pemerintahan yang baik, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Korupsi merupakan permasalahan besar yang merusak keberhasilan pembangunan nasional. Dan korupsi juga kerap kali menjadi potret buram birokrasi yang ada di negara ini. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna meraih kepentingan pribadi, merugikan kepentingan umum dan Negara secara spesifik. Korupsi menjadi penyebab ekonomi menjadi berbiaya tinggi, politik yang tidak sehat, dan kemerosotan moral bangsa yang terus-menerus.

Anthony Giddens (Ismail, 2010:347) menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam kerangka mewujudkan *good governance*, antara lain:

- a. Menyediakan sarana untuk perwakilan kepentingan masyarakat yang beragam.

- b. Menawarkan sebuah forum untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.
- c. Menciptakan dan melindungi ruang publik yang terbuka dimana debat bebas mengenai isu-isu kebijakan bisa dilanjutkan.
- d. Menyediakan beragam hal untuk memenuhi kebutuhan warga Negara, termasuk bentuk-bentuk keamanan dan kesejahteraan kolektif.
- e. Mengatur pasar menurut keputusan publik dan menjaga persaingan pasar ketika monopoli mengancam.
- f. Menjaga keamanan sosial melalui kontrol sarana kekerasan dan melalui penetapan kebijakan.
- g. Mendukung perkembangan sumber daya manusia melalui sistem pendidikan.
- h. Menopang sistem hukum yang efektif yang menjamin perselisihan ditangani secara adil, tanpa bias ke arah negara atau kepada kepentingan-kepentingan swasta.

Menurut Ahmad Daniri (Ismail, 2010:385) Ketua Komite Nasional Kebijakan *Governance*, pelayanan publik sangat strategis untuk menerapkan *good governance*. Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan *good governance*. *Pertama*, pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Ini berarti jika terjadi perubahan yang signifikan pada pelayanan publik, dengan sendirinya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas. *Kedua*,

pelayanan publik adalah ranah dimana berbagai aspek *good governance* dapat diartikulasikan secara lebih mudah. *Ketiga*, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua pihak.

Sebagaimana informan dari pihak pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, pemilihan informan dari pihak pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo juga dilakukan dengan sengaja. Informan yang dipilih mewakili dari tiap-tiap kelompok pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. Jumlah informan dari pihak pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo adalah 12 orang. Adapun informan yang dipilih peneliti dari pihak pelanggan adalah sebagai berikut:

1. Bapak Restu Gunawan beralamat di Wahyu Taman Sarirogo AJ/25
2. Ibu Nur Aini beralamat di Jl. Brigjen Katamso 250 RT/RW 15/02 Waru
3. Ibu Indra beralamat di Perum Delta Sari J/74 Waru
4. Bapak Sudarmaji beralamat di Ambeng-ambeng RT/RW 10/01 Waru
5. Ibu Budi beralamat di Griya Permata Gedangan I B4/24
6. Bapak Hartono pemilik Toko “Makmur Jaya” Perum Jaya Maspion A4/08 Gedangan
7. Ibu Ananda pemilik “Warnet VipNet” Gor Sidoarjo
8. Ibu Halimah pemilik “Diva Kos” Karangbong RT/RW 04/01 Buduran
9. Bapak Sugiono takmir masjid “Al Abror” Desa Kauman-Sidoarjo
10. Bapak Tohirin anggota “Koramil” Wonoayu
11. Ibu Ayu pemilik “Beta Salon” Perum TAS III Wonoayu
12. Bapak Saifuddin pemilik industri rumah tangga tas dan koper Tanggulangin.

Maka analisis kualitatif dalam penelitian ini bersifat menggambarkan struktur kewenangan, prosedur yang digunakan serta sikap dan perilaku birokrasi yang digunakan dalam memberikan pelayanan. Tujuan analisis kualitatif ini adalah untuk menggambarkan keadaan yang ada serta untuk memecahkan permasalahan kemudian menarik suatu kesimpulan.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan peneliti adalah dengan triangulasi. Triangulasi (Moleong, 2007:330) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Denzim (Moleong, 2007:331) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Sedangkan Patton mendefinisikan triangulasi adalah sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan

perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber yang dicapai dengan cara membandingkan data hasil wawancara pegawai dengan data hasil wawancara pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo.

4.1.1.3 Kondisi Ekonomi

Kedudukan Kabupaten Sidoarjo yang sangat strategis, yang berbatasan dengan Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, Malang, dan Pasuruan apabila ditinjau dari sudut pandang ekonomi akan memberi peluang besar dalam upaya pengembangan ekonomi, terutama di bidang industri, perdagangan dan jasa. Kegiatan ekonomi Kabupaten Sidoarjo menampilkan dua wajah. Di satu sisi kabupaten itu identik dengan tambak. Namun di sisi lain fakta menunjukkan, urat nadi pertumbuhan ekonomi Sidoarjo bertumpu pada ribuan pabrik industri pengolahan.

Dilihat berdasarkan angka distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diketahui bahwa sektor industri pengolahan sebagai sektor ekonomi yang paling besar sumbangannya dalam perekonomian Kabupaten Sidoarjo yaitu sebesar 53,30%, sementara sektor kedua yaitu sektor perdagangan sebesar 24,47 % dan sektor ketiga yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,72 % dimana selain tiga sektor tersebut terdapat beberapa sektor yang memang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi secara riil di Kabupaten Sidoarjo. Terkait mata pencaharian penduduk Kabupaten Sidoarjo, akan disajikan dalam tabel berikut ini:

pertumbuhan meningkat. Sampai saat ini industri pengolahan menjadi lokomotif perekonomian kabupaten.

Perkembangan industri Kabupaten Sidoarjo tidak bisa lepas dari perkembangan Kota Surabaya. Daerah yang berjarak 23 kilometer dari ibukota Propinsi Jawa Timur ini menggantikan peran Surabaya sebagai kota industri. Konsekuensi dari kebijakan Kota Surabaya yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa adalah banyaknya pabrik yang sebelumnya berada di Surabaya pindah ke Sidoarjo. Untuk memperkuat posisinya sebagai daerah industri, pemerintah kabupaten membangun kawasan industri baru yang dikenal dengan istilah Siborian (Sidoarjo, Jabon, dan Krian) atau bisa disebut *Siborian Growthpole Triangle*. Kawasan Sidoarjo dan Krian sudah berkembang. Sarana dan prasarana relatif lengkap seperti air, listrik, telepon, serta sarana transportasi, sedangkan kawasan Jabon masih dalam perencanaan. Di ketiga kecamatan inilah investor menanamkan modal. Selain industri pengolahan, kerajinan tangan merupakan industri penting lainnya.

Namun Pada tanggal 29 mei 2006 musibah lumpur Sidoarjo terjadi, yang berdampak luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Semburan lumpur lapindo ini telah menggenangi sejumlah desa atau kelurahan di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin. Lahan persawahan dan ternak yang tercatat terkena dampak lumpur dan sekitar 30

pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Tercatat 1.873 orang tenaga kerja yang terkena dampak lumpur ini, serta rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur seperti jaringan listrik dan telepon.

Akibat amblesnya permukaan tanah di sekitar semburan lumpur. Ditutupnya ruas jalan tol Surabaya-Gempol hingga waktu yang tidak ditentukan, dan mengakibatkan kemacetan di jalur-jalur alternatif, yaitu melalui Sidoarjo-Mojosari-Porong dan jalur Waru-tol-Porong. Penutupan ruas jalan tol ini juga menyebabkan terganggunya jalur transportasi Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi serta kota-kota lain di bagian timur pulau Jawa. Ini berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro Mojokerto dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur

4.1.1.4 Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting di dalam pembangunan sebuah Negara. Karena pendidikan inilah yang nantinya akan menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) warga negaranya. Seperti yang ditunjukkan oleh *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas SDM didasarkan pada tingkat kesehatan, pendidikan, dan pendapatan penduduk. Dan sekolah merupakan

Sehubungan dengan tingkat pendidikan pegawai yang juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pekerjaan. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula golongan dan pangkatnya. Hal ini dapat diartikan juga bahwa, seberapa jauh pegawai tersebut mempunyai tanggung jawab yang lebih terhadap pekerjaan yang menjadi beban tugasnya.

Tingkat pendidikan pegawai sangat berkaitan erat dengan hasil kinerja pegawai tersebut. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan penempatan jabatannya sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya serta dedikasi yang tinggi terhadap tugasnya, maka tidak menutup kemungkinan kinerja yang dihasilkan pegawai tersebut akan sangat baik.

Tingkat pendidikan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo sebagian besar berpendidikan SMA yaitu sebanyak 377 pegawai, Strata 2 (S2) sebanyak 2 pegawai, berpendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 41 pegawai, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 20 pegawai, dan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 17 pegawai.

Untuk mengetahui komposisi tingkat pendidikan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo lebih jelasnya dapat diketahui dengan melihat tabel 15 berikut ini:

5. Bertindak sebagai otorisator dalam Anggaran Perusahaan Daerah, menandatangani surat perintah uang, giro dan *cheque*.
 6. Menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga.
 7. Menandatangani keputusan Direksi dan naskah dinas lain yang dianggap perlu bagi Perusahaan Daerah.
 8. Menerima laporan dari bawahan atau stafnya dan mengevaluasi laporan tersebut untuk bahan pengambilan keputusan.
 9. Melaksanakan tanggung jawab administratif Perusahaan Daerah kepada Kepala Daerah.
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- b. Direktur Umum, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi keuangan, logistik pelanggan, pemakaian air, penerbitan rekening dan penagihan atau perbendaharaan.
 2. Merencanakan, mengendalikan pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah.
 3. Mengendalikan kekayaan Perusahaan Daerah.
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama

3. Bagian langganan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada direktur umum.
4. Bagian langganan terdiri dari dari :
 - a. Sub bagian hubungan langganan, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 1. Mengerjakan administrasi permohonan calon pelanggan
 2. Mengerjakan administrasi pemasangan baru, pemutusan dan penyambungan kembali saluran air minum pelanggan
 3. Mengerjakan administrasi perubahan nama, perubahan alamat dan perubahan tarif pelanggan
 4. Memberikan pembinaan kepada pelanggan-pelanggan lama
 5. Mengikuti perkembangan pelaksanaan penyelesaian sambungan instalasi air dan keluhan serta pengaduan langganan
 6. Membina hubungan baik antara PDAM dengan pelanggan
 7. Melaksanakan dan mengkoordinasi penyuluhan kepada pelanggan dalam pemakaian air bersih.

perusahaan kepadanya, maka diperlukan adanya perbaikan kualitas SDM pegawai, sekaligus sebagai upaya pengembangan kapasitas pegawai baik dari segi pola pikir keilmuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), sikap mental, moral dan perilaku (*attitude*). Salah satu cara untuk peningkatan kapasitas pegawai adalah melalui pendidikan dan latihan atau diklat pegawai.

Akan tetapi, berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian menuturkan:

“Mengenai diklat kepegawaian PDAM Delta Tirta masih belum bisa mengadakan diklat kepegawaian sendiri, selama ini diklat yang diikuti merupakan undangan atau hasil kerja sama dengan pihak lain. Tetapi, meskipun begitu diklat ini bisa memberikan kontribusi penting dalam pengembangan SDM pegawai PDAM ini. Karena peserta diklat dipilih berdasarkan skill yang dimiliki pegawai tersebut ” (Wawancara dengan Bapak Slamet Setiawan, 8 Mei 2012, jam 10:30 WIB)

Diklat pegawai bertujuan untuk pengembangan intelektual dan skill pegawai. Karena pegawai sebagai *public service* dituntut memiliki kemampuan yang menunjang pemahamannya mengenai persoalan-persoaln publik serta membuat keputusan-keputusan yang tepat. Untuk mengetahui diklat pegawai yang pernah diikuti pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo dalam dilihat dalam tabel 16 berikut:

itu terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dari ungkapan di atas dijelaskan meskipun mengingat posisi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo sebagai BUMD yang dituntut untuk bisa berkontribusi terhadap PAD melalui profit perusahaan, tetapi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo tetap lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Lebih jauh lagi Kepala Bagian Hubungan Pelanggan menuturkan:

“Kalau bisa yah jumlah pelanggan banyak terus meningkat, semuanya dapat kita layani dengan baik, dan mereka bisa merasa puas dengan layanan yang kami berikan. Kan, jika pelanggan banyak, profit perusahaan meningkat, kita bisa menyeter ke PAD juga banyak, Yah nantinya PAD juga kembali ke masyarakat sendiri, untuk pembangunan infrastruktur Sidoarjo juga” (Wawancara dengan Bapak I Made Astawa, 3 Mei 2012, jam 10:00 WIB)

Di dalam memberikan pelayanan, Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada kelompok pelanggannya. Baik dari kelompok pelanggan 1A sampai kelompok pelanggan 4B. Kepala Humas Bagian Hubungan Pelanggan menyatakan:

“Tentu saja kami memberikan pelayanan yang sama kepada pelanggan kami, tanpa memandang pelanggan tersebut dari kelompok pelanggan mana, baik itu kelompok pelanggan 2D atau bahkan kelompok 4A. Yah, meskipun yang bisa memberikan pemasukan bagi PDAM Delta Tirta adalah dari kelompok pelanggan 4A. Terlebih lagi dari kelompok pelanggan khusus, seperti Bandara Juanda. Untungnya Bandara Juanda tidak diambil alih oleh Pemerintah Surabaya, sehingga hal ini bisa menjadi keuntungan bagi kita, karena pendapatan terbesar kita ya dari

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari dokumen *company profile* PDAM Delta Tirta 2011, adapun inovasi-inovasi peningkatan pelayanan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Pengaduan gangguan kebocoran 1x6 jam.
2. Pelayanan pasang baru : bayar sekarang, besok pasang.
3. Pembayaran pasang baru dengan fasilitas Kredit Mikro dari Bank BRI.
4. Program In House Kredit adalah program kredit angsuran pasang baru dengan membayar uang muka Rp. 300.000,00 dan sisanya diangsur 6x ke PDAM Sidoarjo.
5. Program SMART (Sistem Manajemen dan Analisa Rekening Terpadu) untuk layanan pembayaran rekening langsung cetak dan online di seluruh kantor cabang PDAM.
6. Program SOAN (Sistem Otomasi Antrian) untuk memudahkan pelayanan pembayaran dan pengaduan pelanggan.
7. Program SIADI (Sistem Informasi Aduan dan Informasi Kebocoran) untuk pelayanan pengaduan melalui SMS.
8. Program SINTA (Sistem Informasi Tagihan dan Tunggakan Rekening).
9. Program CORE (Computerised Registration) pendaftaran komputerisasi untuk pasang baru.
10. Program i-APPLE (Informasi Angka Penjualan dan Pelanggan).

11. Program pembayaran rekening sistem Drive Thru untuk memudahkan pelanggan dalam membayar rekening tanpa harus turun dari kendaraan.
12. Kerjasama payment point dengan PT. Pos Indonesia.
13. Kerjasama pembayaran dengan Autodebet Bank Niaga.
14. Kerjasama e-Channel (ATM), SMS, Banking, Internet Banking dengan Bank Mandiri Tbk.
15. SISFOJAR (Sistem Informasi Jaringan) adalah sistem informasi jaringan perpipaan berbasis Sistem Informasi Geografis yang kedepannya terintegrasi dengan sistem informasi manajemen.
16. Program APPLE (Aplikasi Penerimaan Pendapat Lengkap).
17. SITIKA adalah sistem informasi dan analisa tingkat kehilangan air (aplikasi yang dimanfaatkan dalam upaya analisa meter zoning dan tingkat kehilangan air di cabang-cabang).
18. SIKEMANG (Sistem Informasi Khusus Eksekutif dan Manajemen) merupakan layanan informasi push sms dan email kepada direksi.

Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo berkomitmen bahwa dalam menjalankan seluruh proses bisnis perusahaan akan didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Berikut ungkapan dari salah satu pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo yang bertempat tinggal di Wahyu Taman Sarirogo AJ-25 :

Mulai dari sistem pembayaran secara on-line hingga adanya sistem *Short Message Service* (SMS) centre untuk pengaduan pelanggan. Kesemua inovasi pelayanan tersebut tujuannya tidak lain hanya untuk kemudahan dan kepuasan pelanggan. Dengan adanya pelayanan secara on-line tersebut, pelanggan dapat dengan mudah melakukan transaksi pembayaran tanpa datang langsung ke kantor Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo.

Dengan adanya sistem SMS centre, pelanggan dapat dengan mudah melakukan pengaduan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo terkait beberapa persoalan yang dihadapinya seperti air macet, air keluarnya kecil, air keruh dan sebagainya. SMS centre tersebut dapat diterima oleh Bagian hubungan pelanggan, Bagian Litbang, Direksi, dan Kepala kantor cabang. Dengan demikian stakeholder dapat mengetahui secara langsung keluhan pelanggan dan dengan segera dapat mengatasi keluhan pelanggan tersebut. Koreksi atas keluhan pelanggan ini, dalam seharinya ada dua kali koreksi, yakni pada jam 16.00 dan pada jam 00.00, hal ini bertujuan untuk mengoreksi dalam sehari itu terdapat berapa pengaduan pelanggan, kasus apa saja yang diadukan dan berapa kasus yang telah diselesaikan. Jadi kinerja pegawai di lapangan dapat langsung dimonitoring oleh stakeholder Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. Berikut tabel yang menyajikan

Dengan adanya inovasi-inovasi pelayanan, Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo sebagai organisasi sektor publik sangat mengutamakan kepuasan pelanggan dan berupaya mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

Selain bisa memberikan inovasi-inovasi pelayanan, Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo juga harus bisa menunjukkan performa sikap pelayanan yang baik. Pegawai harus memiliki sikap dan perilaku yang informatif, komunikatif, sopan dan responsif. Karena dalam pelayanan publik, terdapat dua pihak yang saling berinteraksi dan mempunyai kepentingan yang berbeda. Pihak pemerintah sebagai abdi masyarakat dan abdi negara sebagai pihak *provider* pelayanan publik yang berhadapan dengan masyarakat yang mempunyai hak disamping kewajiban sebagai *users* pelayanan publik Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. Berikut penuturan dari Kepala Humas Bagian Hubungan Pelanggan:

“Pelayanan prima yang kami berikan kepada masyarakat (*costumers*), tentunya juga harus disertai dengan sikap kami yang bersahabat dengan pelanggan. Kami harus sopan, murah senyum, dan tanggap terhadap setiap keluhan pelanggan. Kami tidak mau mbak pelanggan itu kecewa terhadap pelayanan kami. Selain harus mampu memberikan kualitas layanan yang baik, prosedur layanan yang cepat dan efisien, kami juga harus bisa mempunyai sikap dan perilaku baik dan beretika”. (Wawancara dengan Bapak Yoyok Supriyanto, 16 Mei 2012, jam 09.00 WIB)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan dari pihak pelanggan tersebut, menyatakan bahwa sikap pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan cukup ramah, bersahabat, dan murah senyum. Berikut pernyataan dari Kepala Humas Bagian Pelanggan:

“Menegenai pelayanan kami telah mengalami banyak perubahan, dari sisi sikap dan perilaku pegawai PDAM ini telah memahami keinginan dan tuntutan pelanggan untuk selalu bersikap murah senyum, lemah lembut, ramah, serta informatif. Selain itu juga tetap tegas dalam memberlakukan aturan yang sama terhadap semua pelanggan. Kami juga memberikan informasi bahwa kami dapat dihubungi lewat telepon (031) 8941788, Fax (031) 8962670 atau e-mail pdamdeltatirta@yahoo.com sebagai alur keluhan pelanggan, ada informasi yang kurang jelas dan untuk saran atau kritik disediakan kotak saran di depan loket pembayaran tagihan rekening”.
(Wawancara dengan Bapak Edy, 23 Mei 2012, jam 13.00 WIB)

4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo

Dari hasil penelitian dilapangan, telah ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat reformasi birokrasi pelayanan publik di Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. Kemudian faktor pendukung dan penghambat reformasi birokrasi pelayanan publik tersebut dikelompokkan menjadi faktor pendukung internal dan eksternal juga faktor penghambat internal dan eksternal.

pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Dengan demikian, kinerja lembaga (organisasi) salah satunya ditentukan oleh kinerja sekelompok orang sebagai pelaku organisasi. Sebaliknya, kinerja sekelompok orang sebagai pelaku organisasi ditentukan oleh struktur, peralatan, dan keuangan yang dimiliki oleh organisasi. Sekelompok orang akan mempunyai rasa tanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan segala sikap, perilaku dan sepak terjangnya yang dipengaruhi oleh pengetahuan, kemampuan, kecakapan, dan harapan-harapan.

Dengan mencermati elaborasi tersebut, maka dibutuhkan beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja suatu lembaga (organisasi). Beberapa strategi tersebut tentunya dilakukan dalam bingkai meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Terkait dengan hal ini, dari hasil penelitian di lapangan, ditemukan beberapa langkah strategis Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kinerja birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

4.3.1.1.1 Adanya Sistem Reward dan Punishment

Sistem *reward* dan *punishment* merupakan faktor terpenting dalam membentuk aparatur yang bertanggung jawab, disiplin, bersemangat, loyal dan tangguh. *Reward* disini diartikan sebagai sebuah penghargaan secara konkret dapat berupa upah, hadiah, kompensasi, isentif dan lain sebagainya yang sejenis dengan itu. Sedangkan *punishment* dapat diartikan hukuman, sanksi, pidana dan sebagainya. Kedua istilah ini berasal dari bahas Inggris yaitu suatu pola atau metode dalam pembinaan personil yaitu memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi, berjasa, taat, berdisiplin dan memberikan hukuman kepada mereka yang melakukan pelanggaran atau berbuat indisipliner.

Reward dan *Punishment* dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo dalam pembinaan dan pengembangan pegawai melalui prinsip dasar pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan pemberian hukuman atau sanksi kepada mereka yang melakukan indisipliner. Secara konkret *reward* dan *punishment* yang dijalankan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Reward yaitu pemberian penghargaan dan kepercayaan kepada pegawainya yang berprestasi dan taat kepada aturan kepegawaian berupa kenaikan pangkat, isentif atau honorarium dan sebagainya. Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo memberikan reward kepada Tim Kelelawar, yakni Tim khusus yang ditugaskan untuk mengidentifikasi kebocoran pipa air distribusi. *Reward* tersebut diberikan setiap hari senin kepada Tim yang berhasil menemukan kebocoran pipa distribusi.

Reward juga bisa diberikan kepada pegawai yang telah berhasil membawa nama baik Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. Misalnya *reward* untuk pegawai yang berhasil memenangkan lomba penulisan karya ilmiah tingkat nasional, *reward* ini dapat berupa kenaikan pangkat.

Pemberian penghargaan tidak saja berupa pemberian kenaikan gaji atau kenaikan pangkat tetapi juga pemberian kepercayaan untuk menduduki suatu jabatan khususnya jabatan struktural. Oleh karena itu, di Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo terdapat formasi jabatan. Formasi jabatan ini dinilai berdasarkan hasil kinerja pegawai, yang dievaluasi setiap akhir tahunnya oleh Direksi. Formasi jabatan adalah perubahan penempatan jabatan di dalam struktur

organisasi. Dengan adanya formasi jabatan ini, dapat diketahui apakah masing-masing pegawai dapat bekerja dengan baik sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai konsekuensi dari adanya penerapan reward kepada pegawai maka harus pula diimbangi adanya penerapan punishment. Bentuk pemberian sanksi ini dapat berupa hukuman, penurunan jabatan, pemotongan gaji bahkan pemutusan hubungan kerja. Semua bentuk *punishment* tersebut tergantung dari tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pegawai. Misalnya saja, selama tiga bulan berturut-turut pegawai melanggar kedisiplinan, maka pegawai tersebut akan diberi sanksi berupa surat peringatan. Untuk pelanggaran berat seperti pegawai diketahui menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba) maka punishment yang diberikan bisa berupa pemutusan hubungan kerja.

Sistem *reward* dan *punishment* yang diberlakukan di Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo ini tidak lain adalah untuk dapat memotivasi pegawai agar meningkatkan kinerjanya, sehingga tercipta iklim kompetisi pegawai yang sehat. Dengan adanya sistem *reward* dan *punishment* ini dapat membangun pola perilaku birokrasi yang profesional.

4.3.1.1.2 Melakukan Capacity Building Melalui Diklat Kepegawaian

Strategi untuk meningkatkan kinerja birokrasi, yaitu meningkatkan kemampuan atau kualitas pegawai. Pegawai dapat dikatakan berkualitas, jika mereka mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Kemampuan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan tadi, hanya dapat dicapai jika mereka mempunyai bekal pendidikan, latihan dan pengalaman yang cukup dan memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Manajemen Sumber Daya Manusia salah satu unsur dari pengembangan pegawai adalah pemberian pangkat, pemberian jabatan, pendidikan dan latihan. Maka dalam penelitian ini peneliti memperoleh bahwa pengembangan birokrasi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo melalui pendidikan dan pelatihan pegawai. Hal ini bertujuan sebagai suatu upaya pengembangan kapasitas pegawai baik dari segi pola pikir keilmuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), sikap mental, moral dan perilaku (*attitude*).

Pemberian kemampuan melalui pelatihan ini, maksudnya mengikutsertakan pegawai pada setiap ada kesempatan dalam kegiatan pelatihan, kursus, seminar, diskusi

dan sejenisnya baik yang diselenggarakan sendiri maupun diselenggarakan oleh lembaga lain bisa publik maupun bisnis.

Akan tetapi, pelatihan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo selama ini masih undangan dari pihak lain. Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo masih belum bisa menyelenggarakan pelatihan pegawai sendiri. Dengan mengikutsertakan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo dalam kegiatan ini, pegawai akan bertambah wawasan, dan pengetahuan. Atau paling tidak, akan dapat mendukung dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai birokrat pelayan publik.

Melalui rangkaian kebijakan, program dan kegiatan diklat pegawai tersebut diharapkan akan terjadi proses perubahan secara terstruktur dari pola pikir dan pola perilaku pegawai, sehingga pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo senantiasa mengedepankan pelayanan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

4.3.1.1.3 Menyusun Corporate Plann Sebagai Media Evaluasi Kinerja Manajemen PDAM Delta Tirta Sidoarjo

Corporate Plann merupakan bagian yang penting dari salah satu unsur Perusahaan Daerah Air Minum. Corporate Plann adalah dokumen Perusahaan Daerah Air Minum Delta

Tirta Kabupaten Sidoarjo yang disusun setiap 4 tahun sekali, yang merumuskan rencana perusahaan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Dengan adanya corporate plann Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo dapat mengevaluasi kinerja dan sistem manajemen perusahaan apakah sudah berjalan dengan baik atau justru sebaliknya. Dengan demikian dapat dikontrol target-target apa saja yang telah berhasil dicapai oleh perusahaan. Adapun tujuan penyusunan corporate plann bagi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, antara lain:

1. Merupakan perspektif yang menghubungkan antara kondisi PDAM saat ini (*existing*) dengan kondisi mendatang, kondisi internal dengan kondisi eksternal Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo
2. Merupakan sarana untuk mengkaji cara paling efektif dalam menghadapi tantangan atau kendala yang timbul, baik yang disebabkan faktor eksternal maupun internal Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo.
3. Merupakan panduan atau kerangka kerja (*framework*) untuk keputusan-keputusan yang akan diambil dalam pengelolaan perusahaan, dan karena itu di dalamnya mengandung target-target yang hendak dicapai dalam kurun waktu mendatang, maka sekaligus akan memberikan motivasi kerja pegawai.

4. Merumuskan konsep pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo sebagai suatu sistem terpadu, terkait, menyeluruh dan menyatu guna mengantisipasi perubahan kebijaksanaan pelayanan air minum di masa yang akan datang.
5. Merupakan keputusan yang mempunyai dampak jangka panjang dan strategis bagi pencapaian tujuan Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo dan pengelolaan sumber daya yang ada.
6. Memberikan batasan formal terhadap tindakan masyarakat sehingga dapat dihindarkan terjadinya pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo berdasarkan selera pribadi yang dapat merugikan perkembangan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Kunci keberhasilan bagi perencanaan strategi terletak pada kemampuan manajemen dalam mendeteksi perubahan-perubahan lingkungannya. Hal ini akan memungkinkan manajemen mempunyai kedudukan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai masalah serta kesempatan pertumbuhan yang diciptakan lingkungan. Analisa lingkungan juga memungkinkan organisasi mengantisipasi dan mempengaruhi kegiatan dalam lingkungan tugasnya, terutama untuk

4.3.1.2.1 Memiliki Inovasi Pelayanan Berbasis Kecanggihan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Telah diketahui bahwa akhir-akhir ini perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi berjalan dengan sangat pesat. Maka dari itu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang ada, Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo melakukan inovasi-inovasi pelayanan. Hal itu sebagai wujud komitmen Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo ingin memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dengan adanya inovasi pelayanan berbasis kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi semakin memberi kemudahan bagi pelanggan untuk melakukan transaksi pembayaran, mengadakan pengaduan, mengetahui info kebocoran dan sebagainya. Inovasi pelayanan ini, membuat pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo kepada pelanggan lebih efektif dan efisien.

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan pelanggan, menyatakan bahwa melalui inovasi pelayanan yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo ini mereka merasa puas, dan pelayanan yang diberikan juga cukup baik serta sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Hal tersebut telah membuktikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan baik.

mengungkapkan bahwa ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Prinsip yang dimaksud adalah *assurance* (jaminan) baik pengetahuan tentang pelayanan, perilaku dan kemampuan pegawai dalam memberikan layanan dan *emphathy* (empati), rasa perhatian yang penuh secara personal terhadap pelanggan. Lebih lanjut dikemukakan oleh Ratminto dan Winarsih (2006:87) bahwa ada prinsip-prinsip yang dapat dipakai sebagai acuan dalam manajemen pelayanan adalah menjalin komunikasi dan interaksi khusus dengan pengguna layanan.

Hal yang sama disampaikan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry (Tjiptono, 2008:95) bahwa terdapat lima dimensi utama sebagai tolok ukur kualitas pelayanan yang baik, yakni reliabilitas (*reliability*), berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menyampaikan layanan yang dijanjikan secara akurat sejak pertama kali. Daya tanggap (*responsiveness*), berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan penyedia layanan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka dengan segera. Jaminan (*assurance*), berkenaan dengan pengetahuan dan kesopanan pegawai serta kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya (*trust*) dan keyakinan pelanggan (*confidence*). Empati (*empathy*), berarti bahwa perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan. Bukti fisik (*tangibles*), berkenaan dengan penampilan fisik fasilitas

layanan, peralatan atau perlengkapan, sumber daya manusia dan materi komunikasi perusahaan.

Sesuai dengan data yang didapat di lapangan, Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo dapat memenuhi lima dimensi yang diungkapkan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry tersebut. Terkait reliabilitas (*reliability*) Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo mampu memberikan layanan secara akurat, sesuai dengan jenis-jenis layanan yang dimilikinya. Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo juga memiliki kemampuan yang cukup bagus dalam merespon permintaan atau keluhan pelanggan. Daya tanggap yang dimiliki cukup baik, hal ini juga didukung dengan adanya layanan SMS Centre yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. Melalui layanan ini, pelanggan dapat melakukan pengaduan atau dapat mengetahui informasi terkait informasi kebocoran dan informasi tagihan dengan mengirim SMS ke nomor SMS Centre tersebut. Dengan adanya layanan SMS Centre ini, pelanggan dapat dengan mudah melakukan pengaduan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo terkait beberapa persoalan yang dihadapinya seperti air macet, air keluarnya kecil, air keruh dan sebagainya. SMS center tersebut dapat diterima oleh Bagian Hubungan Pelanggan, Bagian Litbang, Direksi, dan Kepala kantor cabang. Dengan demikian stakeholder dapat

mengetahui secara langsung keluhan pelanggan dan dengan segera dapat mengatasi keluhan pelanggan tersebut.

Terkait dimensi jaminan (*assurance*), yang berkenaan dengan pengetahuan, kesopanan dan kemampuan pegawai, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo dalam dimensi jaminan (*assurance*) cukup baik, karena pegawai di lapangan telah dibekali dengan pelatihan-pelatihan. Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo juga berusaha memahami masalah para pelanggannya, dan bertindak demi kepentingan pelanggan, oleh karena itu Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo lebih berorientasi pada pelanggan. Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo memiliki sikap yang komunikatif, ramah, sopan dan murah senyum hal ini sejalan dengan dimensi empati (*empathy*). Berkenaan dengan penampilan fisik fasilitas layanan, peralatan, perlengkapan Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo memiliki bukti fisik (*tangibles*) yang sangat baik. Kondisi kantor pelayanan yang nyaman, ruang tunggu ber-AC dengan jumlah tempat duduk yang banyak, memiliki mesin nomor antrian untuk mengatur agar antrian berjalan dengan tertib, tempat parkir yang luas dan aman. Semua itu tidak lain bertujuan untuk kenyamanan pelanggan.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran di lapangan Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten

dan efisiensi, kesetaraan, konsensus, visi strategis dan penegakan hukum. Dari kesembilan karakteristik *Good Governance* tersebut, berikut akan diuraikan bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo dalam kerangka menciptakan reformasi birokrasi.

Akuntabilitas intinya setiap pejabat publik harus bertanggungjawab dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya (Widodo, 2001:297). Dari hasil wawancara dengan beberapa informan dari pelanggan menyebutkan bahwa pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, cukup bertanggungjawab dengan tugasnya sebagai *public service*, indikasinya adalah pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo dengan segera merespon keluhan pelanggan, baik itu terkait debit air yang keluar kecil, tidak lancar atau keruh. Di samping itu pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo berasumsi bahwa pelanggan adalah seperti raja yang harus dilayani dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab.

Transparansi pada intinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik harus dilakukan secara transparan baik mekanisme, prosedur, maupun kebijakan apa yang sedang dan akan dilakukan (Widodo, 2001:297). Terkait dengan aspek transparansi ini, peneliti menemukan bahwa dalam implementasinya di Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya

bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam hal rekrutmen pegawai belum bisa dilakukan secara transparan, rekrutmen masih bersifat tertutup. Tetapi dalam aspek yang lainnya seperti penetapan, posisi, jabatan atau kedudukan, pemberian penghargaan kepada pegawai, penetapan kebijakan perusahaan telah dilakukan secara terbuka. Artinya, semua unsur pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo mulai dari Direksi hingga staf mengetahui tentang hal tersebut.

Selanjutnya, responsivitas merupakan pertanggungjawaban dari sisi seberapa jauh pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo terhadap bersikap tanggap (respon) terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi pelanggan. Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo dinilai memiliki daya tanggap yang cukup baik, apalagi terbantu dengan adanya layanan SMS Centre untuk pengaduan pelanggan.

Sedangkan aspek penegakan hukum (*rule of law*) pada intinya para pelaku penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik harus berani bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan secara hukum tentang segala sikap, perilaku dan kebijakan yang telah dilakukan. Terkait dengan hal ini seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penerapan mekanisme *reward* dan *punishment* untuk pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo merupakan indikator dari penerapan aspek *rule of law* ini, secara adil dan tidak diskriminatif.

Prinsip *good governance* lainnya adalah kesetaraan (*equity*), yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik (Ubaedillah, 2008:177). Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo mengimplementasikan prinsip ini dengan tanpa mengenal perbedaan dalam memberikan pelayanan kepada masing-masing kelompok pelanggannya, baik itu dari kelompok pelanggan rumah tangga maupun kelompok pelanggan khusus seperti Bandara Juanda. Padahal dari segi profitnya, kelompok pelanggan khusus lebih banyak memberikan keuntungan bagi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. Tetapi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo memberikan pelayanan sama kepada seluruh pelanggannya.

Kemudian prinsip partisipasi, yakni bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Semua warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan (Widodo, 2001:25). Indikasi yang menunjukkan penerapan prinsip ini di Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo adalah adanya forum pertemuan antara pegawai dan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, di dalam forum pertemuan ini pelanggan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terkait kinerja dan kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. Hal ini membuktikan bahwa pelanggan dan pegawai

Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo memiliki interaksi dan partisipasi yang cukup baik.

Prinsip efektivitas dan efisiensi adalah menciptakan pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna (Ubaedillah, 2008:177). Dengan adanya inovasi pelayanan yang berbasis kecanggihan teknologi dan komunikasi menjadikan Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Hasil wawancara dengan informan dari pihak pelanggan menyebutkan bahwa pelanggan merasa puas dengan adanya inovasi pelayanan tersebut, di samping itu juga dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan, misalnya dengan adanya pembayaran online melalui ATM Bank Mandiri dan ATM Bank Niaga.

Selanjutnya, prinsip orientasi kesepakatan (*consensus orientation*), bahwa proses apapun harus dilakukan melalui musyawarah melalui konsensus, diputuskan secara bersama dengan seluruh unsur terkait (Ubaedillah, 2008:177). Tetapi, prinsip ini belum bisa diimplementasikan di Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo karena dalam pengambilan keputusan masih didominasi oleh Direksi, dan bersifat tertutup tanpa ada musyawarah. Pegawai tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan tersebut. Misalnya, keputusan terhadap kenaikan jabatan seorang pegawai, yang menentukan dan memutuskan kenaikan jabatan tersebut adalah Direksi, tanpa ada musyawarah terbuka yang melibatkan seluruh pegawai.

Yang terakhir adalah prinsip visi strategis, yaitu pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Dengan kata lain, kebijakan apapun yang diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Bukti konkret adanya prinsip ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo memiliki *Corporate Plann*, dimana di dalam *Corporate Plann* tersebut dirumuskan agenda strategis Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Selain itu, *Corporate Plann* digunakan untuk menganalisis persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak semua prinsip *good governance* bisa diterapkan di Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. Tentunya penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo tersebut masih perlu perbaikan secara terus-menerus.

4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo

Dalam sebuah organisasi apapun bentuknya, dalam setiap pelaksanaan kegiatan pastilah selalu dijumpai suatu kendala-kendala, baik yang muncul dari dalam (internal) maupun datang dari luar (eksternal). Kendala-kendala tersebut harus disikapi dan dihadapi. Sebagai sebuah

Dalam hal ini, Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Kerjasama dengan pihak swasta ini tentunya memiliki beberapa manfaat seperti peningkatan kapasitas produksi, peningkatan jumlah pelanggan, peningkatan kualitas air, peningkatan konsumsi pemakaian air, dan membantu dalam penekanan kehilangan air.

Kerjasama yang terjalin dengan pihak-pihak swasta ini sebagai wujud responsivitas Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo terhadap pelanggan. Karena Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo harus tanggap terhadap persoalan-persoalan pelanggan, harus memahami kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks. Maka dari itu guna menghadapi kebutuhan yang semakin kompleks, Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo menyadari bahwa dibutuhkan sebagai upaya kerjasama dengan pihak lain untuk menjawab semua persoalan dan kebutuhan pelanggan yang kompleks itu. Hal ini sesuai dengan asas responsif dalam pelaksanaan good governance, dimana pemerintah (birokrasi) harus proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Sidoarjo kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan orang dalam.

Potret buram itulah yang masih terlihat, nepotisme sangat dominan. Hal ini bertentangan dengan teori Weber (Surbakti, 2010:234) yang menyatakan bahwa tipe ideal birokrasi adalah setiap pegawai dalam organisasi ini direkrut menurut prinsip kualifikasi teknis (*merit system*). Oleh karena itu pola rekrutmen Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo yang masih bersifat tertutup ini harus diubah.

Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo harus menerapkan sistem rekrutmen dengan paradigma yang baik dan metode yang benar. Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo harus mengedepankan meritokrasi atau *merit system*, merekrut berdasarkan kemampuan dan prestasi (kinerja), bukan berdasarkan semangat nepotisme, kekeluargaan atau pertemanan.

Fit and proper test sudah lazim diterapkan dalam memilih pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, sejatinya adalah upaya untuk menerapkan *merit system*. Begitu juga *fit and proper test* harus dilaksanakan secara transparan, dapat dikawal

bekerja”, tetapi juga harus “mampu berkinerja”. Pergeseran paradigma ini agar memiliki output yang jelas dan terukur.

Penempatan pegawai tidak sesuai dengan *basic skill* ini mengakibatkan pegawai tidak mampu melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Di Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo sebagian besar latar belakang pendidikan pegawainya tidak sesuai dengan penempatannya. Penempatan karyawan dengan *basic skill* yang tidak sesuai dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, sehingga Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo terkesan tidak efisien, banyak karyawan dengan kemampuan kerja yang terbatas. Penyebab utamanya karena Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo tidak mempunyai sistem rekrutmen pegawai sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Fenomena yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo ini sangat bertentangan dengan teori birokrasi yang dikemukakan Weber (Ritzer, 2010:42) bahwa ciri birokrasi ideal adalah adanya serangkaian porsi-porsi jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tepat (*a series of official positions, each having prescribed duties and*

responsibilities). Disamping itu juga Weber juga menyatakan bahwa dalam birokrasi yang ideal harus ada personel yang secara teknis memenuhi syarat yang dipekerjakan atas dasar karier dengan promosi yang didasarkan atas dasar kualifikasi dan penampilan (*technically qualified personnel employed on career base, with promotion based qualification and permormance*).

Berpijak pada teori ini, seharusnya Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo menempatkan pegawai untuk satu posisi pekerjaan benar-benar berdasarkan kemampuan dan prestasi yang dimiliki pegawai tersebut. Hal ini bertujuan untuk kemajuan Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo.

Untuk menunjang penerapan kebijakan penataan personil sesuai formasi jabatan yang tersedia, diperlukan parameter yang obyektif. Karena itu, perlu memberlakukan *fit and proper test* bagi para pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo yang akan memangku jabatan tertentu sebagai salah satu kriteria penempatan seseorang ke dalam formasi jabatan yang tersedia. Dalam penerapannya, kebijakan ini harus dapat dihindarkan berkembangnya faktor *like and dislike* dalam proses

		<p>3. Responsivitas</p> <p>4. Penegakan Hukum</p> <p>5. Kesetaraan</p> <p>6. Efisiensi dan Efektivitas</p> <p>7. Partisipasi</p> <p>8. Orientasi Kesepakatan</p> <p>9. Visi Strategis</p>	<p>transparan</p> <p>Cukup tanggap terhadap setiap keluhan pelanggan terbantu dengan adanya SMS Centre</p> <p>Adanya Perda yang menjadi badan hukum PDAM Delta Tirta</p> <p>Adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pelanggan, baik dari kelompok 2A sampai 4B.</p> <p>Inovasi pelayanan yang berbasis IT membantu PDAM Delta Tirta dapat memberikan pelayanan yang efisien dan efektif.</p> <p>Adanya forum pertemuan pelanggan dan pegawai PDAM untuk mengkritisi kinerja dan pelayanan PDAM Delta Tirta.</p> <p>Belum terlaksana, keputusan masih didominasi oleh Direksi.</p> <p>Terlaksana, memiliki Cooperate Plann untuk merumuskan agenda strategis perusahaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.</p>
B	Faktor Pendukung dan Penghambat Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di PDAM Delta Tirta Sidoarjo	<p>1. Komitmen pegawai yang tinggi</p> <p>2. Menjalinkan kerjasama dengan pihak swasta</p> <p>3. Adanya peraturan dan sanksi pelanggaran terhadap pelanggan</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Terlaksana dengan baik</p> <p>Terlaksana</p>
3	Faktor Pendukung Internal	1. Adanya dukungan dari eksekutif dan DPRD	Interaksi yang baik antara eksekutif, DPRD dan stakeholder PDAM
4	Faktor Pendukung Eksternal	1. Upah Minimum Kabupaten (UMK) meningkat	Peningkatan kesejahteraan pegawai

		2. Posisi Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah industri	Menjadi peluang untuk menambah jumlah pelanggan
5	Faktor Penghambat Internal	1. Rekrutmen pegawai yang masih bersifat tertutup 2. Penempatan pegawai tidak sesuai (<i>miss match</i>) dengan <i>basic skill</i>	Ada indikasi nepotisme, karena rekrutmen masih berdasarkan asas kekerabatan Belum bersifat obyektif, tidak sesuai dengan spesialisasi pendidikan
6	Faktor Penghambat Eksternal	1. Dampak semburan lumpur lapindo	Membuat distribusi air bersih terganggu

harus menerapkan *merit system* dan *fit and proper test* yang akuntabel dan transparan.

4. Untuk menciptakan iklim kerja yang kompetitif diantara pegawai, sekaligus untuk membentuk kedisiplinan pegawai, mekanisme *reward* dan *punishment* yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo masih harus dijalankan secara konsisten.
5. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo harus bisa menyelenggarakan diklat kepegawaian secara konsisten, mandiri dan terarah.
6. Penempatan pegawai di Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai (*miss match*) dengan *basic skill* yang dimiliki, untuk itu harus ada penyesuaian spesifikasi pendidikan dan *basic skill* pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo masih harus lebih aktif, inovatif dalam merencanakan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

